

Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2005-2021

Qarina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin, Makassar.

Abstrak

Kemiskinan menjadi salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sampai saat ini masih menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini salah satunya diakibatkan karena program pemerintah yang dinilai masih kurang tepat sasaran untuk orang miskin. Maka dari itu, penelitian ini akan mengidentifikasi belanja modal, jumlah pengangguran, dan inflasi untuk melihat keterkaitannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat diketahui pengaruh belanja modal, jumlah pengangguran, inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder belanja modal, jumlah pengangguran, inflasi, dan tingkat kemiskinan di Indonesia sejak 2005-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan variabel belanja modal dan inflasi berpengaruh positif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Belanja modal; jumlah pengangguran; inflasi; tingkat kemiskinan

Analysis of the effect of government spending, unemployment and inflation on the poverty rate in Indonesia 2005-2021

Abstract

Poverty is one of the most important problems faced by developing countries, one of which is Indonesia. Improving the standard of living and welfare of the community is still the main goal in economic development. One of the causes of the current poverty problem is that government programs are considered to be still not well targeted for the poor. Therefore, this study will identify capital expenditures, unemployment, and inflation to see how they relate to reducing poverty in Indonesia. So it is hoped that with this research it can be seen the effect of capital expenditure, the number of unemployment, inflation on the poverty level in Indonesia. The type of research used is descriptive quantitative research. The data sources used in this study are secondary data on capital expenditures, unemployment, inflation, and poverty rates in Indonesia from 2005-2021 which were obtained from the Central Statistics Agency and Bank Indonesia. And the analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the variable number of unemployed had a positive and significant effect on the level of poverty. And the variables of capital expenditure and inflation have a positive but significant effect on the poverty level.

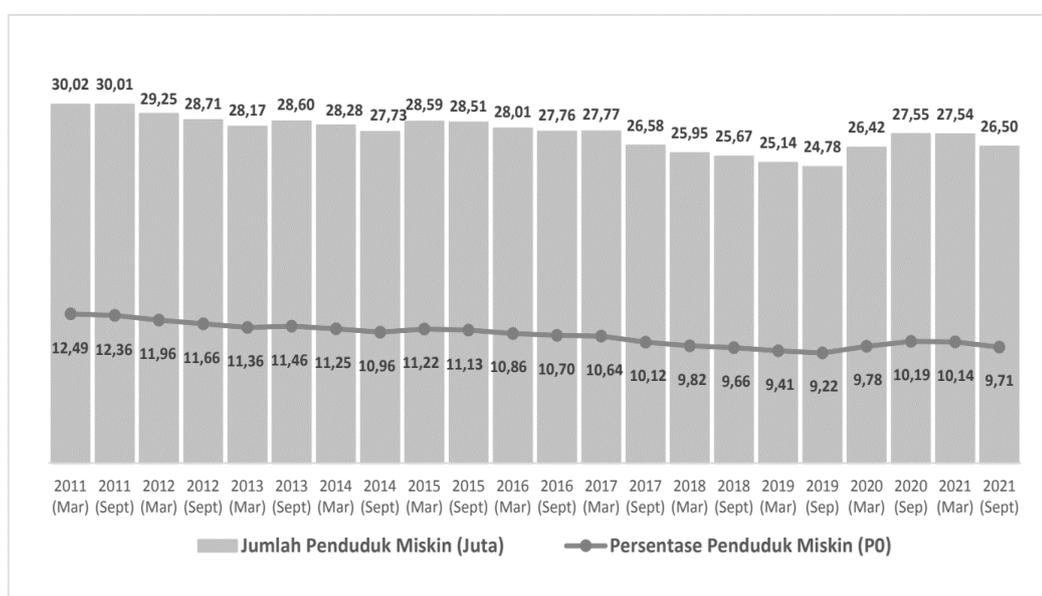
Key words: *Capital expenditure; total unemployment; inflation; poverty level*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah besar yang kompleks dan multidimensi, sehingga diperlukan upaya atau kebijakan Pemerintah yang berkelanjutan dan sinergis untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan menjadi semakin rumit. Pertumbuhan ekonomi belum mampu dikatakan sebagai indikator dari penurunan kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pun masih memiliki sejumlah besar orang yang bertahan untuk hidup.

Salah satu tujuan utama dari Bank Dunia adalah untuk mengurangi kemiskinan global menjadi sembilan persen pada tahun 2020 dan menjadi tiga persen pada tahun 2030, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Seseorang dikatakan miskin ketika pendapatan kurang dari \$2,15 per orang per hari. Selama 25 tahun terakhir kemiskinan terus mengalami penurunan. Namun, tren tersebut terhenti pada tahun 2020, kemiskinan kembali meningkat akibat adanya Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan Penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan penghentian pekerjaan selama pandemi sangat merugikan rumah tangga miskin. Perempuan, pemuda, dan pekerja berupah rendah dan informal, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan, termasuk di antara yang paling terpuak. Ketimpangan meningkat baik di dalam negara maupun antar negara, dengan dampak jangka panjang pada akses ke peluang dan mobilitas sosial.

Di Indonesia, fenomena kemiskinan menjadi salah masalah perlu ditangani secara serius karena Indonesia masih termasuk negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin yang masih terbilang tinggi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik pada September 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26 juta orang.



Gambar 1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2011-September 2021

Secara umum, pada periode Maret 2011–September 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2011 sampai dengan September 2021

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Suatu negara dapat dikatakan berhasil jika laju pertumbuhan PDB lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk suatu negara. Sehingga, pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti dalam kehidupan masyarakat. (Mishkin, 2011) mengungkapkan Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan tersebut, tetapi juga yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika perekonomian semakin membaik maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Angka pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan menimbulkan bubble economy bila tidak diikuti dengan kebijakan yang pro poor. (Sasana & Kusuma, 2018)

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran publik dapat meningkatkan permintaan agregat yang selanjutnya merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara peningkatan belanja pemerintah dapat menyebabkan defisit fiskal. Tetapi jika pemerintah mengurangi pengeluaran mereka, hal itu dapat berdampak buruk pada perekonomian. Tetapi kelebihan pengeluaran pemerintah karena pengeluaran saat ini atau penggunaan yang tidak produktif atas kapasitas pengumpulan pajak ekonomi menciptakan defisit fiskal. Banyak ekonom percaya bahwa defisit fiskal adalah akar penyebab dari setiap penyakit dalam perekonomian. Defisit fiskal dapat membahayakan kesejahteraan karena beberapa alasan, seperti: dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan dapat menekan investasi swasta. Lebih jauh lagi, peningkatan rasio utang terhadap PDB mungkin berdampak negatif pada kesinambungan fiskal jangka panjang negara; itu mungkin mempengaruhi kesejahteraan generasi berikutnya. (Mehmood & Sadiq, 2010)

Selain itu, dalam Teori Keynesian dinyatakan bahwa pemerintah mampu meningkatkan keseimbangan yang fundamental antara tabungan, konsumsi, dan investasi. Sementara angkatan kerja juga menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan yang mampu mempengaruhi permintaan barang dan jasa. (Stack, 1978) mengungkapkan bahwa permintaan merupakan fungsi yang relatif untuk meningkatkan konsumsi dan menabung. Jika jumlah tabungan lebih besar daripada jumlah investasi, maka modal tidak akan mampu untuk mempertahankan keadaan full employment. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah tabungan lebih besar maka akan berdampak pada perekonomian, karena dapat menurunkan permintaan tenaga kerja dan sehingga akan mengakibatkan adanya masalah baru yaitu meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berdampak pada ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi (Alamanda, 2020).

(Stack, 1978) mengungkapkan bahwa pemerintah diharapkan mampu untuk membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara tabungan, konsumsi, dan investasi. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dalam hal pengeluaran pemerintah, seperti program jaminan sosial, subsidi, dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui sarana seperti proyek pekerjaan umum dan industri kepemilikan pemerintah juga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, keterlibatan pemerintah melalui program peningkatan lapangan kerja dapat memberikan multiplier effect. Dengan adanya program meningkatkan terbukanya lapangan kerja akan mampu menciptakan produktifitas yang lebih tinggi, dan juga uang yang dihasilkan dapat diinvestasikan kembali baik di sektor publik maupun swasta. Oleh karena itu, teori tersebut menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan melalui tiga jalur. Pertama, jenis pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup rumah tangga berpendapatan rendah. Kedua, semakin banyak tercipta lapangan kerja melalui proyek pekerjaan umum, semakin sedikit pengangguran dan semakin rendahnya tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Ketiga, multiplier effect dari program penciptaan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi dan reinvestasi. Adapun dampak dari pengeluaran pemerintah tersebut, yaitu terciptanya lapangan kerja, dan multiplier effect yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pada akhirnya akan menumbuhkan iklim yang mendukung redistribusi pendapatan karena orang kaya dapat mengurangi bagian pendapatan relatif mereka, sementara pada saat yang sama mampu meningkatkan jumlah absolut pendapatan riil. (Alamanda, 2020)

Kebijakan fiskal dalam alokasi fungsi yang tercermin melalui pengeluaran Pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan prinsip *pro poor*. Kemiskinan akan selalu ada di setiap negara dan kemajuan bersifat endemik. Fungsi Pemerintah dalam hal ini adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia memiliki banyak modifikasi kebijakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Misalnya Operasi Pasar Khusus (OPK), pemberian raskin (Beras miskin), jaring pengaman sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri, dan lain-lain. Kenyataannya, kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tidak dapat disamakan di setiap daerah, hal ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah, sosial, dan demografi. Pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih sempurna terhadap wilayahnya, sehingga kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai dengan kondisi di wilayahnya. (Sasana & Kusuma, 2018)

(Sen, 2009) mengungkapkan bahwa masalah kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang yang bersangkutan dengan masalah akses-akses. Diantaranya adalah akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dan akses kesempatan kerja. Kemiskinan absolut merupakan konsep utama dalam menganalisis permasalahan kemiskinan. Kritik pendapat terhadap Sen adalah teori kapabilitas, seperti pertama, sulitnya mengukur indikator kemudahan akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dan akses kesempatan kerja. Kedua, sifat orang yang individualistis dalam hal memiliki kemampuan untuk mengakses. Sementara itu, (Davis & Martinez, 2015) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan konsep relatif utama dalam menganalisis permasalahan kemiskinan. (Sasana & Kusuma, 2018)

(World Bank, 2012) merilis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan antara lain kondisi karakteristik sektor makro, rumah tangga, masyarakat, dan individu. Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, adat istiadat, dan budaya. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja maupun tidak seimbang karena pemerataan pembangunan dan hasil yang tidak merata. (Sasana & Kusuma, 2018)

(Rashid & Kemal, 1997) mempelajari kebijakan makroekonomi dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, menemukan bahwa pertumbuhan di atas ambang batas sekitar 5 persen, peningkatan lapangan kerja dan remitansi adalah variabel terpenting yang menjelaskan perubahan kemiskinan dari waktu ke waktu. Sementara itu, (Benneth, 2007) meneliti peran kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan di Nigeria. Dia menggunakan model ekuilibrium umum untuk studi dan menyimpulkan bahwa pendapatan pemerintah juga secara positif mendistribusikan kembali pendapatan tetapi pengeluaran pemerintah adalah alat yang penting dan efektif untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Dan, (Volker, 2005) telah melakukan studi tentang proses pertumbuhan Tanzania dan pengurangan kemiskinan bahwa bagaimana privatisasi skala besar, liberalisasi dan kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi kemiskinan melalui saluran yang berbeda, seperti investasi swasta dan pasar pertukaran. Dia berpendapat bahwa reformasi ekonomi dan stabilisasi makroekonomi, menghasilkan pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang rendah yang secara signifikan berdampak pada kemiskinan. (Mehmood & Sadiq, 2010)

(Cutler & W. Katz, 1991) menemukan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan anak-anak (hingga usia 17 tahun) dan orang dewasa (usia 18 hingga 64 tahun). (DeFina, 2004)

Sejak tahun 2006 hingga 2011, Rusia mengalami penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan di Rusia menurun dari 15,2 persen menjadi 12,7 persen. Kenaikan besar dalam upah minimum terjadi selama periode ini. Sehingga temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. (Brown, 1999) menyatakan bahwa upah minimum mempengaruhi kemiskinan melalui dua saluran utama: (1) saluran pekerjaan, dan (2) saluran distribusi upah. Literatur mengenai hubungan antara upah minimum dan pekerjaan dicampur sehubungan dengan arah efek upah minimum. Menurut teori ekonomi klasik, kenaikan upah minimum mengurangi lapangan kerja dan meningkatkan pengangguran. Mengingat bahwa orang-orang yang menganggur, sebagai suatu

peraturan, merupakan bagian terbesar dari populasi yang didefinisikan sebagai orang miskin, efek dari upah minimum dapat meningkatkan kemiskinan. Model yang berbeda melonggarkan dan memperluas asumsi model klasik dengan menunjukkan bahwa interaksi antara upah minimum dan pekerjaan lebih rumit (lihat ulasan Brown, 1999; Neumark & Wascher, 2008). Sementara itu (Manning, 2011) menyatakan dalam model monopsoni, sedikit peningkatan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan lapangan kerja. Adapun, (Fields & Kanbur, 2007) memberikan kerangka teoretis untuk tiga efek kemiskinan yang berbeda: naik, turun, dan tidak berubah. Mereka berasumsi bahwa pembagian pendapatan dalam rumah tangga harus diperhitungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan dampak kemiskinan yaitu, rasio upah minimum terhadap garis kemiskinan, elastisitas permintaan tenaga kerja, rasio pendapatan dan tingkat kedalaman kemiskinan. (Fields et al., 2008) menemukan faktor lain dalam komposisi rumah tangga dan menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menentukan arah perubahan kemiskinan yaitu, diferensiasi upah, pekerjaan yang memperoleh upah tinggi dan upah rendah serta elastisitas permintaan tenaga kerja yang berkaitan dengan upah minimum. (Kapelyuk, 2015)

Literatur empiris juga menyajikan hasil yang varitif. Pada penelitian sebelumnya, (Card & Krueger, 1995) menemukan efek pengurangan kemiskinan yang sederhana di AS. Beberapa penelitian tidak menemukan efek menguntungkan dari peningkatan kemiskinan akibat upah minimum di AS (Burkhauser & Sabia, 2007; Neumark & Wascher, 2002; Neumark et al., 2005; Sabia, 2008; Sabia dan Burkhauser, 2010). (Arango & Pachon, 2004) menemukan beberapa efek peningkatan kemiskinan di Kolombia, dan (Neumark et al., 2006) tidak menemukan dampak yang terkait dengan upah minimum di Brasil. Sementara, (Maloney & Pacheco, 2012) hanya menemukan pengaruh kecil dari upah minimum terhadap distribusi pendapatan di Selandia Baru. Selanjutnya (Pauw & Leibbrandt, 2012) menemukan beberapa efek pengurangan kemiskinan dari upah minimum di Afrika Selatan, mereka menyimpulkan bahwa upah minimum bukanlah kebijakan anti kemiskinan yang efektif. Dengan menggunakan analisis simulasi, (Bird & Manning, 2008) mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil rumah tangga miskin di Indonesia yang diuntungkan dari kenaikan upah minimum, sementara sebagian besar rumah tangga miskin diakibatkan oleh harga yang meningkat. Sementara itu, (Gindling & Terrell, 2010) dan (Alaniz et al., 2011) meneliti pengaruh upah minimum spesifik industri di Honduras dan Nikaragua. Untuk memperoleh efek upah minimum, mereka mengurangi sampel menjadi individu yang saat ini bekerja dan individu yang bekerja sebelum kenaikan upah minimum. (Gindling & Terrell, 2010) menemukan efek pengurangan kemiskinan sederhana di Honduras, sementara (Alaniz et al., 2011) menemukan bahwa menaikkan upah minimum meningkatkan kemungkinan bahwa keluarga miskin akan keluar dari kemiskinan di Nikaragua. (Kapelyuk, 2015)

(Romer & Romer, 1999) mempelajari dampak kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Mereka menemukan bahwa regresi pada perubahan kemiskinan pada perubahan inflasi yang tidak terduga dapat menghasilkan koefisien yang kecil dan tidak signifikan. Namun, hubungan antara perubahan kemiskinan dan perubahan inflasi yang diantisipasi memiliki hubungan yang signifikan. Estimasi ini menyiratkan bahwa peningkatan inflasi yang diantisipasi sebesar satu poin persentase dikaitkan dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,2 poin persentase. Menurut Romer, inflasi yang tidak terduga mengurangi nilai riil aset dan kewajiban nominal sehingga menyebabkan kerugian modal riil bagi kreditur dan keuntungan modal riil bagi debitur. Jika orang miskin adalah debitur, efek ini menguntungkan mereka. Namun, faktanya adalah rumah tangga miskin biasanya memiliki kewajiban kecil, sehingga manfaat dari inflasi yang tidak terduga ini menjadi tidak signifikan. Adapun, (Shiller, 1996) menemukan bahwa ada perbedaan mencolok antara orang awam dan ekonom dalam memandang inflasi. Shiller menemukan bahwa di antara non-ekonomis, kekhawatiran terbesar dengan inflasi tampaknya menurunkan standar hidup masyarakat. Studi lain oleh (Easterly & Fischer, 2001) menegaskan bahwa inflasi lebih merugikan orang miskin lebih daripada orang kaya. Dengan data polling untuk 31.869 rumah tangga di 38 negara, mereka mengklasifikasikan orang dalam tiga kategori, yaitu orang miskin, tidak miskin namun tidak kaya, serta orang kaya melalui kategorisasi diri. Dalam kuesioner survei, orang yang mengklasifikasikan diri mereka sebagai orang miskin, tidak miskin namun tidak kaya, dan orang kaya menurut standar mereka sendiri. Dari studi ini, Easterly dan Fischer menemukan bukti yang mendukung pandangan bahwa inflasi dianggap lebih sebagai masalah oleh orang miskin daripada orang tidak miskin dan bahwa inflasi mengurangi pendapatan relatif orang miskin. (Erosa & Ventura, 2002) mengamati bahwa rumah tangga miskin

memiliki lebih banyak uang tunai dibandingkan aset keuangan lainnya daripada rumah tangga kaya. Akibatnya, Orang miskin kemudian membayar bagian yang tidak proporsional dari pajak inflasi sehingga lebih dirugikan oleh inflasi. Menurut (Braumann, 2004) turunnya upah riil selama inflasi juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kemiskinan di Amerika Latin selama dua dekade terakhir. (Rashid Talukdar, 2012)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan upah minimum di Indonesia sejak tahun 2005-2021. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS.

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + \mu$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Keterangan:

Y : Tingkat Kemiskinan (Persen)

X1 : Belanja Modal (Rupiah)

X2 : Jumlah Pengangguran (Nominal)

X3 : Inflasi (Persen)

β_0 : Nilai konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

β_2 : Koefisien Regresi Jumlah Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

β_3 : Koefisien Regresi Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

μ : Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1.
Uji Normalitas Data

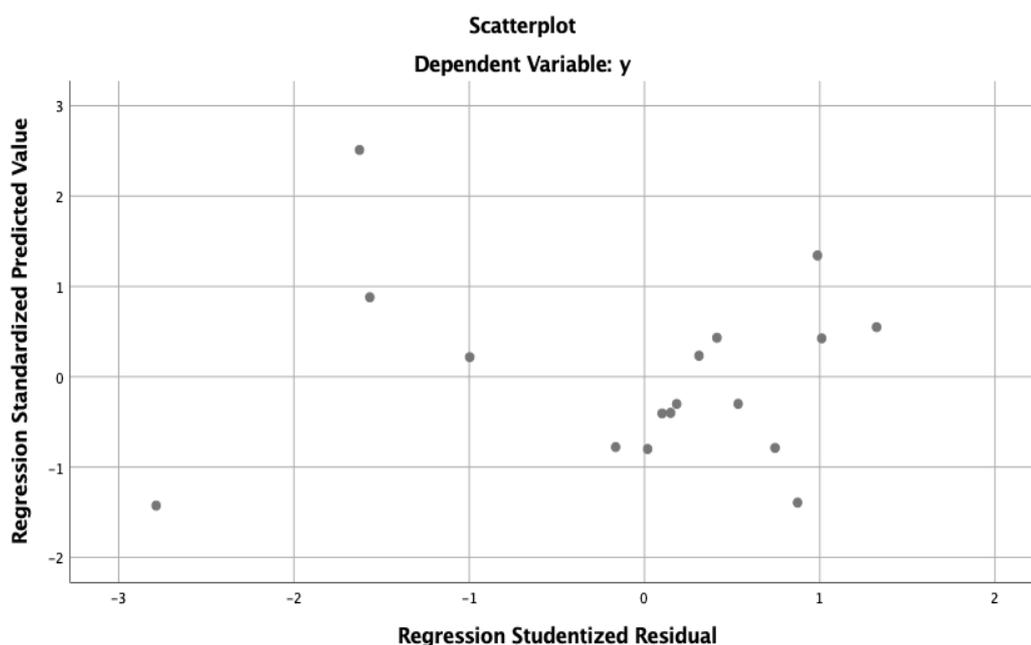
N		17
Normal Parameters, b	Mean	.00000000
	Std. Deviation	1.49412484
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.066
	Negative	-.137
Test Statistic		.564
Asymp. Sig. (2-tailed)		.908

Berdasarkan pada tabel 1 dapat kita ketahui bahwa hasil uji normalitas dengan Koglomorov-Smirnov test diketahui nilai signifikansi yaitu $0.908 > 0.05$ maka data dinyatakan normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Belanja Modal	0.987	1.013
Inflasi	0.855	1.170

Pada Tabel 2 hasil dari uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yang dilakukan serta dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Hasil dari perhitungan nilai tolerance > 0.1 sehingga tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil dari nilai VIF menunjukkan hal yang serupa yaitu tidak adanya satu variabel VIF yang memiliki nilai lebih dari 10 artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas karena nilai VIF pada masing-masing variabel.



Gambar 2.

Uji Heterokedastisitas
Model Scatter Plot

Pada Gambar 2 mengenai scatterplot dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu dan tersebar dengan baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (uji statistik T)

Tabel 3.
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	-21747.630	7351.550		-2.958	.011
Belanja Modal	7.404E-8	.000	.197	1.0018	.327
Jumlah Pengangguran	1.426E-5	.000	.640	3.076	.009
Inflasi	.121	.186	.136	.648	.528

Berdasarkan Tabel 3 dapat kita lihat bahwa variabel Belanja Modal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 7,4046 bernilai positif dan memiliki nilai t-hitung sebesar 1,0018 < t-tabel 1,745884 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,327 > 0,05 yang artinya variabel Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan pada variabel Jumlah Pengangguran menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,4265 dan bernilai positif dengan nilai t-hitung 3,076 > nilai t-tabel 1,745884 dengan nilai signifikansi yaitu 0,009 < 0,05 yang artinya variabel jumlah pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan, terakhir pada variabel Inflasi terdapat koefisien regresi senilai 0,121 dan positif dengan t-hitung senilai 0,648 < nilai t-tabel 1,745884 dimana nilai signifikansi pada variabel inflasi adalah 0,528 yang artinya variabel inflasi berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Uji Signifikansi Simultan (uji statistik F)

Tabel 4.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1216010.095	3	405336.700	4.667	.020b
	Residual	1129125.783	13	86855.829		

	Total	2345135.88	16		
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan					
b. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Pengangguran, Belanja Modal					

Dari Tabel 4 Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,667 dengan tingkat probabilitas (signifikansi) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan secara bersama-sama atau simultan ada pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal (X1), Jumlah Pengangguran (X2), dan Inflasi (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720a	.4519	.407	294.71313
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Pengangguran, Belanja Modal				

Pada Tabel 5 Nilai dari koefisien determinasi ini akan digunakan peneliti untuk mengetahui besarnya Lama Mencari Kerja (Y) yang telah dijelaskan oleh variabel-variabel lain (X1, X2, dan X3). Berdasarkan tabel 7 yang telah diolah oleh peneliti menggunakan data-data yang telah dikumpulkan menunjukkan koefisien determinasi (R²) adalah 0,451. Angka ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam penelitian untuk menerangkan variabel dependen sebesar 45% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain seperti variabel Upah dan tingkat pajak yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 7,4046 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,327 yang memiliki arti bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Artinya, setiap kenaikan belanja modal tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kotambunan et al., 2016) dan (Yolanda & Zulkarnain, 2019) dimana Belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena program-program pemerintah dinilai masih kurang efektif dan tidak tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan. Program-program pemerintah belum mampu untuk menysasar masyarakat miskin secara tepat. Sehingga banyak tidaknya belanja modal yang pemerintah adakan belum mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Jumlah pengangguran menjadi salah satu ukuran dalam mengukur tingkat kemiskinan. Semakin banyak orang yang bekerja maka tingkat kemiskinan semakin rendah karena ketika seseorang bekerja maka mereka akan mempunyai penghasilan sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam penelitian ini variabel jumlah pengangguran menunjukkan nilai koefisien yang positif yaitu 1,4265 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < \text{tingkat signifikansi } 0,005$, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dimana semakin meningkat jumlah pengangguran maka tingkat kemiskinan juga akan ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Octaviani, 2001) dalam (Yacoub, 2012) yang menggunakan pendekatan analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke, menemukan bahwa pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran semakin meningkat angka kemiskinan, begitupun sebaliknya jika angka pengangguran mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan di Indonesia juga akan menurun. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2009) dengan menganalisis peran desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap, jumlah penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya adalah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan.

Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki koefisien regresi yang positif senilai 0,121 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,528 sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Artinya, setiap

kenaikan yang terjadi pada inflasi tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugartiningsih & Shaleh, 2017) yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara inflasi dan kemiskinan di Indonesia dan sesuai dengan teori makroekonomi dimana ketika inflasi meningkat maka pendapatan riil akan menurun sehingga kemiskinan karena daya beli masyarakat akan menurun.

SIMPULAN

Variabel belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;

Variabel jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana setiap terjadi peningkatan jumlah pengangguran, maka tingkat kemiskinan juga akan ikut meningkat; dan

Variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. (2020). *The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia*.
- Alaniz, E., Gindling, T. H., & Terrell, K. (2011). The impact of minimum wages on wages. *Labour Economics*, 18(S1), S45–S59.
- Arango, C. A., & Pachon, A. (2004). *The Minimum Wage in Colombia: Holding a Middle with a Bite on The Poor*. Unpublished Paper, Colombia: Banco de La Republica.
- Benneth, O. (2007). *Fiscal Policy and Poverty Reduction: Some Policy Options for Nigeria*. African Economic Research Consortium, Aerc Research Paper 164.
- Bird, K., & Manning, C. (2008). Minimum Wages and Poverty in a Developing Country: Simulations from Indonesia's Household Survey. *World Development*, 36(5), 916–933.
- Braumann, B. (2004). High Inflation and Real Wages. *IMF Staff Papers*, 51(1).
- Brown, C. (1999). *Minimum Wages, Employment, and The Distribution of Income (Vol. 3B)*. Elsevier,.
- Burkhauser, R. v., & Sabia, J. J. (2007). The Effectiveness of Minimum-Wage Increases in Reducing Poverty: Past, Present, and Future. *Contemporary Economic Policy*, 28(2), 262–281.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1995). *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage*. Princeton University Press.
- Cutler, D., & W. Katz. (1991). *Macroeconomic Performance and The Disadvantaged*. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 1–74.
- Davis, E. P., & Martinez, M.-S. (2015). *Economic Theories of Poverty*. National Institute of Economic and Sosial Research.
- DeFina, R. H. (2004). *The Impacts of Unemployment on Alternative Poverty Rates*. *Review of Income and Wealth Series (Vol. 50, Issue 1)*.
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2).
- Erosa, A., & Ventura, G. (2002). On Inflation as a Regressive Consumption Tax. *Journal of Monetary Economics*, 49(4), 761–795.
- Fields, G. S., Han, B., & Kanbur, R. (2008). *Poverty Effects of The Minimum Wages: The Role of Household Employment Composition*. Department of Applied Economics and Management Cornell University Working Paper No. 51147.
- Fields, G. S., & Kanbur, R. (2007). Minimum Wages and Poverty with Income-Sharing. *Journal of Economic Inequality*, 5(2), 135–147.

- Gindling, T. H., & Terrell, K. (2010). Minimum Wages, Globalization and Poverty in Honduras. *World Development*, 38(6), 269–308.
- Kapelyuk, S. (2015). The Effect of Minimum Wage on Poverty: Evidence from RLMS-HSE Data. *Economics of Transition*, 23(2), 389–423. <https://doi.org/10.1111/ecot.12066>
- Kotambunan, L., Wim Palar, S., & Tumilaar, R. L. H. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)
- Maloney, T., & Pacheco, G. (2012). Assessing The Possible Antipoverty Effects of Recent Rises in Age-Specific Minimum Wages in New Zealand. *Review of Income and Wealth*, 58(4), 648–674.
- Manning, A. (2011). *Imperfect Competition in The Labor Market* (Vol. 4B). Elsevier.
- Mehmood, R., & Sadiq, S. (2010). The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. In *Romanian Journal of Fiscal Policy* (Vol. 1, Issue 1).
- Mishkin, F. S. (2011). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. 4th Canadian ed. Pearson Canada Inc.
- Neumark, D., Cunningham, W., & Siga, L. (2006). The Effects of The Minimum Wage in Brazil on The Distribution of Family Incomes. *Journal of Development Economics*, 80(1), 136–159.
- Neumark, D., Schweitzer, M., & Wascher, W. L. (2005). The Effects of Minimum Wages on The Distribution of Family Incomes: A Nonparametric Analysis. *The Journal of Human Resources*, 40(4), 867–894.
- Neumark, D., & Wascher, W. L. (2002). Do minimum Wages Fight Poverty? *Economic Inquiry*, 40(3), 315–333.
- Neumark, D., & Wascher, W. L. (2008). *Minimum Wages*. The MIT Press.
- Octaviani, D. (2001). Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. *Media Ekonomi*, 7(8).
- Pauw, K., & Leibbrandt, M. (2012). Minimum Wages and Household Poverty: General Equilibrium Macro-Micro Simulations for South Africa. *World Development*, 40(4), 771–783.
- Rashid, A., & Kemal, A. (1997). Macroeconomic Policies and Their Impact on Poverty Alleviation in Pakistan. *The Pakistan Development Review*.
- Rashid Talukdar, S. (2012). The Effect of Inflation on Poverty in Developing Countries: A Panel Data Analysis.
- Romer, C. D., & Romer, D. H. (1999). Monetary Policy and The Well-Being of The Poor. *Economic Review*, 21–49.
- Sabia, J. J. (2008). Minimum Wages and The Economic Well-Being of Single Mothers. *Journal of Policy Analysis and Management*, 27(4), 848–866.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 10, Issue 1).
- Sasana, H., & Kusuma, P. (2018). Government Expenditure and Poverty in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(10), 142. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3125>
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Allen Lane.
- Shiller, R. J. (1996). *Why Do People Dislike Inflation?* Cowles Foundation for Research In Economics, Yale University. Discussion Paper , 1115.
- Stack, S. (1978). The Effect of Direct Government Involvement in The Economy on The Degree of Income Inequality: A Cross-National Study. *American Sociological Review*, 880–888.

- Sugiartiningsih, & Shaleh, K. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2014
- Volker, T. (2005). Tanzania's Growth Process and Success in Reducing Poverty. IMF Working Paper.
- World Bank. (2012). World Development Indicator 2012.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. 3(2).